

# **KEBIJAKAN PAPUA NUGINI DALAM KASUS PNG SOLUTION; POTRET PERANGKAP KETERGANTUNGAN**

**Ghea Nawafilla - 071311233028**

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini menjelaskan mengenai kembalinya Papua Nugini untuk menjalin kerjasama dengan Australia dalam bidang imigrasi. Australia merupakan negara yang diminati oleh pencari suaka hingga mengakibatkan meningkatnya kedatangan pencari suaka setiap tahunnya. Melihat hal ini, pemerintah Australia pun khawatir atas pertahanan nasionalnya terkait pencari suaka yang datang menggunakan perahu atau dikenal dengan manusia perahu. Kedatangan manusia perahu tersebut dinilai sebagai salah satu jalur masuknya imigran gelap ke Australia. Oleh karena itu, Australia memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Papua Nugini dan Nauru dalam Pacific Solution pada tahun 2001 untuk bersedia menampung manusia perahu dari Australia. Namun dalam prakteknya, terjadi berbagai kejadian buruk dan menerima kontra dari masyarakat internasional. Meskipun memiliki pengalaman buruk dalam kerjasama di bidang imigrasi dengan Australia, Papua Nugini tetap menerima tawaran kerjasama Australia kembali dalam PNG Solution pada tahun 2013. Kebijakan Papua Nugini untuk kembali menerima tawaran kerjasama Australia inilah yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini dijelaskan menggunakan perspektif Neo-Marxisme dengan melihat ketergantungan Papua Nugini terhadap Australia dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian bersifat kualitatif ini menemukan bahwa kebijakan Papua Nugini untuk kembali menerima tawaran Australia dalam PNG Solution dikarenakan pemerintah Papua Nugini telah masuk dalam perangkap ketergantungan sehingga tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut.*

**KataKunci:** *PNG Solution, perangkap ketergantungan, pencari suaka*

## ABSTRACT

*This paper aims to explain the return of Papua New Guinea to establish cooperation with Australia in the field of immigration. Australia is a country of interest to asylum seekers to the growing number of asylum seekers each year. Seeing this, the Australian government is also worried about its national defense related asylum seekers who come by boat or known as boat people. The arrival of the boat people is considered as one of the entry routes of illegal immigrants to Australia. Therefore, Australia decided to cooperate with Papua New Guinea and Nauru in the Pacific Solution in 2001 to be willing to accommodate boat people from Australia. In practice, however, there are various adverse events and accept cons of the international community. Despite having a bad experience in immigration cooperation with Australia, Papua New Guinea continues to accept Australia's offer of cooperation back in PNG Solution in 2013. Papua New Guinea's policy of re-accepting Australia's offer of cooperation is interesting to discuss. This paper is described using the Neo-Marxist perspective by looking at Papua New Guinea's dependence on Australia in the economic, political and defense fields. Departing from this, this qualitative study found that Papua New Guinea's policy of re-accepting Australia's offer in PNG Solution because the Papua New Guinea government has entered the trap of dependence has no choice but to accept the offer.*

**Keywords:** PNG Solution, dependency trap, asylum seeker

Hubungan internasional yang terjalin antar negara seringkali bersifat asimetris terutama jika dilihat dari segi tingkat ekonomi negara. Hubungan yang terjalin antar sesama negara borjuis tentu berbeda dengan hubungan antara negara borjuis dengan negara proletar. Seringkali adanya perbedaan status ekonomi yang ada ini mendorong adanya praktek eksploitasi yang dilakukan oleh negara borjuis terhadap negara proletar. Salah satu bukti adalah adanya *PNG Solution* yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Australia dan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2003.<sup>1</sup> Kesepakatan ini berisikan bahwa setiap pencari suaka yang datang ke Australia dengan menggunakan perahu atau lebih dikenal dengan manusia perahu dilarang untuk memasuki wilayah Australia dan nantinya diarahkan untuk menetap di detensi Pulau Manus, Papua Nugini. Sementara nantinya jika sudah diputuskan status legal pengungsinya maka tidak akan diperbolehkan menetap di Australia melainkan di Papua Nugini.<sup>2</sup>

Dalam kebijakan *resettlement* ini terdapat lima poin penting. Pertama, pencari suaka yang tiba dengan perahu dilarang menetap di Australia. Kedua, para pencari suaka tersebut dikirim ke Pulau Manus atau tempat lain di Papua Nugini untuk penilaian status suaka mereka. Ketiga, bagi pengungsi yang legal diperbolehkan bermukim kembali di Papua Nugini. Keempat, perjanjian ini tidak ada perubahan setidaknya selama 12 bulan kedepan dan Kelima, tidak ada batasan jumlah pengungsi yang nantinya menetap di Papua Nugini.<sup>3</sup> Sebagai ganti ketersediaan Papua Nugini ini, Australia meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan untuk pemerintahan O'Neill hingga \$463 juta setiap tahunnya untuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan hukum dan ketertiban serta memperluas fasilitas

---

<sup>1</sup>Anonim, "Assylum Seekers Arriving by Boat to be Resettled in Papua New Guinea", *ABC News Online*, 20 Juli 2013, <http://www.abc.net.au/news/2013-07-19/manus-island-detention-centre-to-be-expanded-under-rudd27s-asy/4830778>(diakses pada 12 November 2016).

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Ibid.

detensi di pulau Manus yang semula hanya mampu menampung 600 penghuni menjadi 3000 penghuni.<sup>4</sup>

Namun sebelum adanya kesepakatan ini, Papua Nugini juga pernah bekerjasama dengan Australia terkait imigrasi dalam *Pacific Solution*. Australia meminta Papua Nugini untuk bersedia menerima manusia perahu milik Australia untuk ditempatkan di detensi Pulau Manus, Papua Nugini yang berlaku sejak tahun 2001 hingga tahun 2008. Namun pelayanan dan fasilitas detensi di Pulau Manus tersebut dinilai buruk bahkan tidak memenuhi standar kelayakan internasional. Organisasi HAM, Amnesty Internasional menyatakan detensi Australia di Pulau Manus termasuk kejam, tak manusiawi dan melanggar larangan terhadap penyiksaan.<sup>5</sup>

Selama *Pacific Solution* berlaku terjadi banyak kasus. Pertama, banyak terjadi pelecehan seksual. Mantan penjaga pusat detensi di Pulau Manus, Rod St George menegaskan bahwa staf imigrasi di pusat detensi mengabaikan serangkaian kasus pemerkosaan dan kekerasan di tahanan laki-laki. Pelakunya diizinkan untuk tinggal bersama korban karena tak ada tempat lain untuk menetap. Kedua, kekurangan air bersih dimana dijatah setiap harinya hanyalah setengah liter. Di bagian pusat detensi terbesar, Oscar, disediakan air dalam jumlah terbatas yang dibagikan menggunakan botol. Pada tiap harinya, disediakan selusin botol dengan kapasitas 19 liter untuk sekitar 500 orang sehingga kurang lebih satu botol berisi 500 ml per orang. Ini jelas tak cukup mengingat suhu disana tinggi sekitar 35° celcius dan lembab. Ketiga, pelayanan kesehatan tidak mencukupi. Hal ini dapat terlihat untuk kebutuhan dasar, seperti sabun saja sulit didapatkan sehingga mudah terjadi penyebaran penyakit dan Keempat, banyaknya kesulitan yang diterima di tempat detensi ini akhirnya berpengaruh pada mental pencari suaka. Tercatat oleh staff Amnesty, Claire Mallinson bahwa sekitar 30% tahanan memiliki masalah kesehatan jiwa. Banyak tahanan yang terkesan ingin menyakiti diri atau bunuh diri.<sup>6</sup>

Selain itu, keputusan Papua Nugini bersedia bekerjasama dalam *PNG Solution* ini juga dianggap menyimpang dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang ditandatangani Papua Nugini pada 17 Juli 1986 dimana Papua Nugini memiliki tujuh poin pengecualian. Pertama, artikel 17(1) tentang negara memberikan hak bagi para pengungsi untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah secara sama. Kedua, artikel 21 tentang negara memberikan perlakuan sebaik mungkin terhadap pengungsi yang tinggal dan adanya pengawasan instansi publik. Ketiga, artikel 22(1) tentang negara memberikan perlakuan yang sama mengenai pendidikan dasar. Keempat, artikel 26 tentang negara memberikan pengungsi yang sah untuk memilih tempat tinggal dan dapat berpindah tempat secara bebas sesuai peraturan yang berlaku bagi orang asing umumnya.

Kelima, artikel 31 tentang negara tidak dapat mengenakan hukuman bagi para pengungsi yang masuk secara tidak sah asalkan mereka segera melaporkan diri ke instansi setempat dan menunjukkan alasan layak untuk masuk secara tidak sah. Keenam, artikel 32 tentang negara tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah diwilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. Ketujuh, artikel 34 tentang negara memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi.<sup>7</sup> Dari tujuh poin

---

<sup>4</sup>Anonim, "Australia's Boat People: The PNG Solution", *The Economist Online*, 27 Juli 2013, <https://www.economist.com/news/asia/21582320-shadow-looming-election-falls-desperate-asylum-seekers-png-solution>(diakses pada 24 Oktober 2017).

<sup>5</sup>Conor Duffy dan Justin Stevens, "Pusat Detensi Pulau Manus Kejam dan Tak Manusiawi", *ABC Radio Australia*, 12 Desember 2013, <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-12/pusat-detensi-pulau-manus-kejam-dan-tak-manusiawi/1233490>(diakses pada 12 November 2016).

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Diana Glazebrook, "Papua New Guinea's Refugee Track Record and Its Obligations under the 2013 Regional Resettlement Arrangement with Australia", *SSGM DISCUSSION PAPER 2014/3, Australia National University*,

pengecualian tersebut maka dapat diketahui jika Papua Nugini tidak memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi sah nantinya yang akan bermukim di Papua Nugini.

### **Terbentuknya *PNG Solution* Antara Australia dan Papua Nugini**

Australia dan Papua Nugini sama-sama meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dimana Papua Nugini meratifikasi pada 17 Juli 1986 sementara Australia meratifikasi pada 22 Januari 1954. Namun terdapat perbedaan antar kedua negara ini yaitu adanya tingkat kesejahteraan yang berbanding terbalik. Australia memiliki tingkat kesejahteraan jauh lebih baik dibanding dengan Papua Nugini. Oleh karena itu, Australia menjadi salah satu negara yang diminati oleh pencari suaka dengan semakin meningkatnya jumlah kedatangan pencari suaka setiap tahunnya. Namun kedatangan pencari suaka pada setiap tahunnya tersebut membuat pemerintah Australia khawatir atas pertahanan nasionalnya sehingga memutuskan untuk menegatkan kebijakan imigrasi.

Namun penetapan kebijakan imigrasi ini ternyata tidak mampu untuk mengurangi jumlah kedatangan pencari suaka secara maksimal. Hingga akhirnya, paska kejadian Tampa pada tahun 2001, pemerintah Australia memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Nauru dan Papua Nugini dalam *Pacific Solution*. Tujuan utama pemerintah Australia memberlakukan *Pacific Solution* ini selain untuk meminimalisir jumlah kedatangan pencari suaka menggunakan perahu tetapi juga untuk mencegah dilakukannya penyelundupan manusia yang seringkali dilakukan melalui jalur laut<sup>8</sup>. Oleh karena itu, pemerintah Australia menilai manusia perahu sebagai imigran gelap.

Namun selama masa pemberlakuan *Pacific Solution* ini terjadi berbagai kejadian buruk seperti kekerasan, pemerkosaan, fasilitas detensi kurang memadai dan lain sebagainya hingga mendapatkan kontra dari masyarakat internasional<sup>9</sup>. Praktek detensi yang buruk ini tidak mengherankan mengingat Nauru dan Papua Nugini merupakan Negara Dunia Ketiga yang tentu tidak mampu memberikan fasilitas dan pelayanan lebih baik dibanding Australia. Namun adanya berbagai peristiwa buruk dan kontra tersebut tidak mampu mengubah keputusan Australia dan *Pacific Solution* tetap diberlakukan.

Meskipun memiliki hubungan yang cukup erat terdapat waktu ketika hubungan kedua negara ini tidak berjalan baik. Hal ini terjadi pada tahun 2006 yang ketika itu hubungan antar kedua negara ini mengalami kerenggangan dikarenakan adanya kasus *Julian Moti Affair* yang mengakibatkan dilarangnya PM Michael Somare untuk memasuki wilayah Australia tetapi *Pacific Solution* masih tetap diberlakukan ketika itu. Namun pada tahun 2007, Perdana Menteri Australia yang baru yaitu Kevin Rudd melakukan normalisasi yang dibuktikan dengan kunjungan PM Kevin Rudd ke Papua Nugini pada tahun 2008 tetapi di tahun 2008 pula *Pacific Solution* diberhentikan karena dinilai sinis, tidak manusiawi dan membutuhkan biaya besar.<sup>10</sup>

Diberhentikannya *Pacific Solution* ini akhirnya dijadikan kesempatan bagi manusia perahu untuk berusaha memasuki wilayah Australia. Kedatangan jumlah manusia perahu pun

---

(Maret 2016), <http://ips.cap.anu.edu.au/sites/default/files/DP-2014-3-Glazebrook-ONLINE.pdf> (diakses pada 17 November 2016).

<sup>8</sup>Lieutenant Commander D. Murphy, "People Smuggling: Defending Australia's National Interest", *Geddes Papers* (2003): 46.

<sup>9</sup>Duffy dan Stevens, "Pusat Detensi".

<sup>10</sup>Anonim, "Flight From Nauru ends Pacific Solution", *The Sydney Morning Herald*, 8 Februari 2008, <http://www.smh.com.au/national/flight-from-nauru-ends-pacific-solution-20080207-1qww> (diakses pada 24 Oktober 2017).

kembali meningkat paska diberhentikannya *Pacific Solution*. Dilain sisi, meskipun *Pacific Solution* sudah berhenti, hubungan kedua negara tetap berjalan baik. Hal ini terlihat pada tahun 2011, PM Peter O'Neill yang ketika itu baru saja dilantik menjadi Perdana Menteri Papua Nugini berusaha melakukan pendekatan dengan Australia melalui memahami politik Australia dan mendekati PM Julia Gillard. Hubungan Australia dan Papua Nugini pun kembali erat.<sup>11</sup>

Hingga akhirnya pada tahun 2012, PM Julia Gillard memilih untuk memberlakukan kembali *Pacific Solution* gelombang II dikarenakan jumlah kedatangan pencari suaka menggunakan perahu kembali meningkat. Selanjutnya pada tahun 2013, Kevin Rudd kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Namun pada masa jabatannya kali ini berbeda dengan sebelumnya yang lebih memilih untuk melonggarkan kebijakan imigrasi. Pada masa jabatan keduanya ini, PM Kevin Rudd memilih keputusan yang berbanding terbalik dengan keputusan sebelumnya yaitu mendukung kebijakan imigrasi Australia yang ketat. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2013, Australia menawarkan kerjasama imigrasi lagi dalam *PNG Solution* kepada Papua Nugini. Meskipun sebelum diterimanya tawaran tersebut, *PNG Solution* telah mendapatkan kontra terlebih dahulu namun hal ini tidak dihiraukan oleh Australia hingga akhirnya tawaran tersebut disambut baik oleh Papua Nugini dan *PNG Solution* pun berhasil ditandatangani pada 19 Juli 2013.<sup>12</sup>

### **Berbagai Bantuan Australia Terhadap Papua Nugini**

Papua Nugini merupakan negara terbelakang dan tidak mandiri. Meskipun telah merdeka, namun pada kenyataannya Papua Nugini masih belum mampu untuk mengolah Sumber Daya Alam yang dimilikinya. Berbagai macam hambatan yang dimiliki seperti infrastruktur yang kurang memadai dan struktur alam dinilai menyulitkan pemerintah lokal dalam mengolah Sumber Daya Alam tersebut. Tidak mampu dalam mengolah Sumber Daya Alam yang dimiliki ini akhirnya membuat pemerintah Papua Nugini memilih untuk mempromosikan investasi asing dan mengandalkan datangnya Bantuan Luar Negeri. Sementara penduduk lokal memilih bertani dan berkebun untuk bertahan hidup.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa Papua Nugini memiliki tingkat ekonomi, hukum, pertahanan, pendidikan dan kesehatan yang rendah sehingga masih menjadi permasalahan sehari-hari Papua Nugini. Dalam bidang ekonomi, Papua Nugini memiliki nilai *Gross Development Product* (GDP) sekitar US\$15,413juta yang apabila dibandingkan dengan negara regional Pasifik Selatan lainnya maka tergolong besar melainkan apabila dibandingkan dengan Negara Dunia Ketiga lainnya seperti Timor Leste maka GDP milik Papua Nugini jauh lebih kecil dibanding GDP milik Timor Leste.<sup>13</sup>

Dalam bidang politik, tingkat politik di Papua Nugini juga tergolong cukup buruk. Hal ini terlihat melalui tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh pejabat lokal Papua Nugini. Jika di masa lalu, korupsi hanya terjadi di lokasi tertentu maka kini meluas terkait dengan instansi pemerintah, seperti polisi, bea cukai, perpindahan tenaga kerja, pemasok dan

---

<sup>11</sup>Jenny Hayward-Jones, "Australia – Papua New Guinea Relation: Maintaining The Friendship", *Lowy Interpreter Online*, 1 Desember 2015, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-papua-new-guinea-relations-maintaining-friendship>(diakses pada 19 Oktober 2017).

<sup>12</sup>Glazebrook, "Papua New Guinea's", 1.

<sup>13</sup>World Bank, *Papua New Guinea: GDP Current*, <https://data.worldbank.org/country/papua-new-guinea>(diakses pada 31 Oktober 2017).

pemimpin tender, lingkungan dan berbagai hal. Bahkan diperkirakan 40% dana APBN Papua Nugini setiap tahunnya lenyap dikarenakan korupsi, pemborosan dan salah kelola.

Dalam bidang pertahanan, tingkat pertahanan Papua Nugini juga buruk. Papua Nugini memiliki Zona Ekonomi eksklusif yang ekspansif (EEZ) mencakup hampir 2,5 juta kilometer persegi namun Angkatan Pertahanan Papua Nugini (PNGDF) yang notabene merupakan negara terbelakang, tidak mampu melakukan pertahanan secara maksimal. Selanjutnya, tingginya tingkat kriminalitas dikarenakan sekitar 60 – 90% dari total jumlah penduduk Papua Nugini merupakan pengangguran dan adanya konflik internal yang berjangka waktu panjang yaitu pemberontakan Bougainville dimana meski telah ada operasi damai namun masih sering terjadi pemberontakan mendadak.

Sementara itu, Australia sebagai negara terdekat Papua Nugini secara historis maupun geografis ini memiliki posisi penting di Papua Nugini. Papua Nugini memiliki beragam permasalahan pada tiap bidang namun Australia selalu memberikan bantuan finansial secara rutin dan terbesar dan seringkali juga memberi bantuan non-materiil. Tetapi berbagai bantuan yang diberikan ini tidak hanya semata untuk membantu Papua Nugini tetapi Australia juga mendapatkan keuntungan tertentu.

Dalam bidang ekonomi, Australia memberikan bantuan finansial rutin yang cukup besar hingga menjadikan Australia sebagai pendonor terbesar bagi Papua Nugini serta jumlah bantuan yang diberikan kepada Papua Nugini juga menjadi jumlah terbesar Bantuan Luar Negeri Australia kepada negara lainnya.<sup>14</sup> Namun meskipun Australia selalu memberikan bantuan rutin serta dalam jumlah yang besar untuk Papua Nugini tetapi tentu dibalik itu Australia memiliki tujuan tertentu. Australia melakukan hal tersebut dikarenakan Papua Nugini dijadikan sebagai *buffer zone* bagi Australia sejak lama. Oleh karena itu, penting bagi Australia untuk tetap menjaga stabilitas *buffer zone*-nya.

Dalam bidang ekspor dan impor, Australia menjadi tujuan utama impor namun menjadi negara tujuan kedua dalam bidang ekspor.<sup>15</sup> meski menjadi negara tujuan kedua dalam bidang ekspor tetapi keuntungan yang didapatkan oleh Australia dari ekspor ini cukup besar. Australia telah melakukan investasi besar-besaran di Papua Nugini sementara barang yang diekspor merupakan barang yang diolah oleh perusahaan Australia di Papua Nugini tersebut. Secara tidak langsung menunjukkan apabila Australia tidak hanya menerima keuntungan dari hasil investasi namun barang yang diolah oleh perusahaan Australia di Papua Nugini juga berpindah ke Australia melalui ekspor tersebut.

Australia juga memberikan investasi besar dan meningkat setiap tahunnya di Papua Nugini. Adanya berbagai investasi Australia yang masuk ke Papua Nugini ini memang memberikan dampak baik bagi perekonomian Papua Nugini namun di lain sisi terdapat kesedihan dimana penduduk lokal Papua Nugini sendiri tidak dapat merasakan hasil tambang dan harus menerima untuk dieksploitasi oleh pihak asing. Tidak hanya lingkungan dan Sumber Daya Alam yang dieksploitasi oleh Australia namun masuknya perusahaan asing yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan nyatanya tidak demikian. Dikarenakan kualitas pendidikan di Papua Nugini yang rendah membuat perusahaan Australia lebih cenderung memilih menggunakan orang Australia yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik dibanding orang Papua Nugini. Sementara perusahaan lokal melemah dikarenakan kalah saing dengan perusahaan asing.

Dalam bidang politik, Australia juga turut membantu Papua Nugini dalam meminimalisir kriminalitas dan memberantas korupsi yang merajalela. Kepolisian Federal

---

<sup>14</sup>Commonwealth of Australia, *The Contribution of Australian aid to Papua New Guinea's Development 1975-2000* (Canberra: Australian Agency for International Development, 2003), 24-5.

<sup>15</sup>Observatory of Economic Complexity (OEC), *Papua New Guinea*, <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/png/#Destinations> (diakses pada 31 Oktober 2017).

Australia (AFP) dan satgas anti korupsi Papua Nugini juga menandatangani kerjasama di Port Moresbypada tahun 2013 sebagai upaya pemberantasan korupsi di Papua Nugini.<sup>16</sup>Nantinya Kepolisian Federal Australia (AFP) dan satgas anti korupsi Papua Nugini akan saling bertukar informasi intelijen untuk melacak pelaku korupsi Papua Nugini yang hendak melakukan investasi di Australia menggunakan hasil korupsi. Meskipun adanya investasi memberikan keuntungan namun apabila terlacak maka akan sulit dan rumit dalam proses hukumnya.

Dalam bidang pertahanan, seperti yang telah dijelaskan apabila Papua Nugini menjadi *buffer zone* bagi Australia. Meskipun Australia telah memberikan bantuan namun adanya bantuan tersebut nyatanya juga untuk kepentingan Australia agar Papua Nugini tetap mampu menjadi *buffer zone*-nya. Bantuan yang diberikan dalam bidang pertahanan seperti berikut. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2003, Australia turut membantu Papua Nugini melalui mengirimkan sekitar 3500 pasukan Australia, memberikan bantuan finansial sebesar US\$ 243 juta dan melatih pasukan lokal sebagai upaya pertahanan pemerintah lokal melawan kelompok separatis Bougainville.<sup>17</sup> Selain itu, , pasukan Australia dan Angkatan Pertahanan Papua Nugini melakukan patroli bersama serta Australia juga memberikan tujuh buah perahu patroli untuk Papua Nugini dalam upaya menjaga EEZ milik Papua Nugini serta pada tahun 2003 Australia turut membantu dengan mengirimkan sekitar 230 petugas polisi dan pejabat publik ke Papua Nugini.<sup>18</sup>Nantinya pegawai negeri Australia menjabat di bidang bea cukai, peradilan, dan departemen pemerintah lainnya sebagai upaya memperkuat hukum di Papua Nugini.

### **Papua Nugini dalam Perangkap Ketergantungan**

Berbagai bantuan yang diberikan oleh Australia untuk Papua Nugini dan ketidakmandirian Papua Nugini tersebut dapat dianalisisdalam perspektif Neo-Marxisme yaitu berbagai bantuan yang diberikan Australia untuk Papua Nugini tidak sepenuhnya murni untuk membantu Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang memiliki kehidupan jauh lebih baik daripada Papua Nugini dan tergolong dalam *core* di Pasifik Selatan tapi tetap saja memiliki tujuan tertentu atas tindakan dan berbagai bantuan yang diberikan selama ini untuk Papua Nugini.

Negara yang termasuk *core* tetap saja tidak hanya sekedar memberikan bantuan secara cuma-cuma namun tetap memiliki tujuan lain. Australia disini sebagai *core* memang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan untuk berbagai negara termasuk Papua Nugini selama ini sebagai usaha nyata mengurangi adanya kemiskinan global. Tetapi dibalik berbagai bantuan yang diberikan Australia tersebut nyatanya terdapat kepentingan

---

<sup>16</sup>Anonim, "Australia – Papua Nugini Libatkan Intel Berantas Korupsi", *Detik News Online*, 4 Desember 2013, <https://news.detik.com/australia-plus-abc/2432459/australia---papua-nugini-libatkan-intel-berantas-korupsi>(diakses pada 31 Oktober 2017).

<sup>17</sup>Shane McLeod, "Australian Police to train Bougainville Force", *ABC Online*,7 September 2004, <http://www.abc.net.au/am/content/2004/s1193835.htm>(diakses pada 31 Oktober 2017).

<sup>18</sup>Nick Squires, "Australia Extends Pacific Power", *Daily Telegraph Online*, 12 Desember2003, <http://www.telegraph.co.uk/news/1449299/Australia-extends-Pacific-power.html>(diakses pada 31 Oktober 2017).

tersembunyi. Contohnya bantuan yang diberikan oleh Australia untuk Papua Nugini tidak hanya sebatas membantu atas nama hubungan persahabatan namun Australia telah sejak lama menjadikan Papua Nugini sebagai *buffer zone* milik-nya.

Australia termasuk negara yang memiliki ketakutan atas berbagai hal terlebih lagi apabila dilihat secara historis. Terlihat bahwa warga asli Australia merupakan orang buangan dari Inggris serta banyak imigran asing yang masuk ketika masa sebelum merdeka Australia. Adanya catatan historis sebagai orang buangan membuat warga asli Australia takut dengan orang asing karena notabene jauh dari kampung halaman yaitu Inggris. Selain itu dalam catatan sejarahnya, Australia juga pernah menerapkan kebijakan imigrasi yaitu *White Australia Policy* yang menolak kedatangan orang non-kulit putih dan lebih memilih imigran dari negara Eropa tertentu khususnya Inggris. Hal ini dikarenakan Australia memiliki *xenophobia* yaitu ketakutan akan datangnya pihak asing dalam negaranya. Terlebih lagi pasca terjadinya peristiwa 9/11 membuat Australia semakin mengalami *xenophobia*. Oleh karena itu, dikarenakan berbagai kekhawatiran dan ketakutan yang dialami Australia ini akhirnya sudah sejak lama menjadikan Papua Nugini yang memiliki letak geografis dekat Australia dan lebih depan dijadikan sebagai *buffer zone* dari segala ancaman yang datang ke Australia.

Diterapkannya Papua Nugini sebagai *buffer zone* ini termasuk terjadi ketika adanya peningkatan jumlah kedatangan manusia perahu di Australia. Australia mengalami kekhawatiran apabila kedatangan manusia perahu tersebut menjadi ancaman pertahanan nasionalnya. Hingga akhirnya Australia kembali memanfaatkan Papua Nugini sebagai *buffer zone* serta ketergantungan yang dialami oleh Papua Nugini selama ini untuk menjadikan Papua Nugini sebagai negara ketiga penerima manusia perahu dan mendirikan tempat detensi disana.

Ketersediaan Papua Nugini untuk menerima tawaran Australia menjadi negara ketiga tentu tidak mudah. Terlebih lagi Papua Nugini merupakan Negara Dunia Ketiga yang tentu tidak mampu memberikan pelayanan sebaik Australia dan sebelumnya telah memiliki permasalahan domestik yang banyak pula. Namun dikarenakan selama ini Papua Nugini telah memiliki ketergantungan terhadap Australia melalui adanya berbagai bantuan yang diberikan oleh Australia untuk Papua Nugini dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan akhirnya membuat Papua Nugini tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran Australia tersebut.

Berbagai bantuan yang diberikan untuk Papua Nugini menjadi cara bagi Australia untuk menciptakan perangkap ketergantungan terhadap Papua Nugini. Australia selalu memberikan bantuan untuk Papua Nugini dalam berbagai hal serta tidak hanya memberikan bantuan materiil saja namun juga bantuan non-materiil. Begitulah cara Australia dalam memberikan perangkap ketergantungan dan tetap menjaga agar Papua Nugini tetap mengalami ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan tersebut. Namun tetap saja dalam pemberian bantuan tersebut, Australia pintar untuk membingkai bantuan yang diberikan agar seolah membantu namun pada nyatanya tetap banyak menguntungkan Australia serta kemiskinan tetap ada di Papua Nugini sehingga Australia tetap memiliki posisi penting di Papua Nugini.

Adanya berbagai bantuan yang selalu diberikan Australia inilah yang akhirnya membuat Papua Nugini tetap berada dalam perangkap ketergantungan Australia. Papua Nugini yang merupakan negara miskin dan telah terbiasa menjalin hubungan dekat dengan Australia secara historis pun sebenarnya menyadari atas perangkap ketergantungan tersebut sejak lama. Namun Papua Nugini tidak dapat melakukan apapun. Hal ini dikarenakan Papua

Nugini merasa tidak mampu untuk mengolah Sumber Daya Alam yang dimiliki secara mandiri dan memang membutuhkan bantuan Australia untuk tetap bertahan hidup. Terlebih lagi kegemaran pemerintah lokal Papua Nugini atas korupsi yang semakin membuat Papua Nugini sulit mengalami kemajuan dan terlepas dari ketergantungan terhadap Australia.

Sementara itu disisi lain, seperti yang dijelaskan sebelumnya apabila dibalik berbagai bantuan yang diberikan kepada Papua Nugini, Australia sebagai suatu negara tentu tidak hanya memberikan berbagai bantuan yang diberikan selama ini secara cuma-cuma untuk Papua Nugini. Terlebih lagi bantuan yang diberikan oleh Australia ini lebih banyak dibandingkan bantuan yang diberikan oleh Australia untuk negara lainnya. Terdapat alasan mengapa Australia selalu memberikan bantuan terhadap Papua Nugini dan menjadikan Papua Nugini sebagai negara istimewa bagi Australia yaitu dikarenakan Papua Nugini merupakan *buffer zone* bagi Australia.

Oleh karena itu, penting bagi Australia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan di Papua Nugini karena nantinya juga akan berpengaruh pada pertahanan Australia juga. Selain itu, berbagai bantuan yang diberikan Papua Nugini juga dikarenakan agar masyarakat Papua Nugini tetap mampu bertahan hidup. Apabila kehidupan Papua Nugini semakin menderita maka dikhawatirkan masyarakat Papua Nugini akan berpindah ke Australia. Seperti halnya manusia perahu, masyarakat Papua Nugini yang hidup kekurangan juga menginginkan untuk bermigrasi ke Australia dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya resiko berpindahnya masyarakat Papua Nugini berpindah tersebut, Australia menjadi negara yang selalu memberikan bantuan bagi Papua Nugini.

Namun meskipun selalu diberikan bantuan secara rutin dan dalam jumlah besar, Papua Nugini sulit mengalami kemajuan signifikan dan tetap menjadi negara miskin. Hal ini dikarenakan Australia sebagai negara yang telah memberikan perangkat ketergantungan bagi Papua Nugini tentu tetap menjaga agar Papua Nugini ini tetap memiliki ketergantungan terhadap Australia. Namun Australia juga tetap menjaga kehidupan di Papua Nugini mengalami peningkatan dan membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Papua Nugini. Salah satunya melalui Australia melakukan investasi besar-besaran di Papua Nugini.

Australia banyak melakukan investasi di Papua Nugini salah satunya perusahaan Australia bernama BPH melakukan investasi di Papua Nugini dalam hal pertambangan. Apabila Papua Nugini yang memiliki kekayaan hasil tambang memilih untuk mempromosikan investasi asing sebagai strategi pembangunan Papua Nugini. Datangnya investasi Australia ini tentu berdampak baik bagi perekonomian Papua Nugini. Namun nantinya keuntungan yang didapatkan lebih banyak mengalir ke Australia. Papua Nugini hanya merasakan perekonomian yang membaik namun kenyatannya hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Selain itu, adanya keberadaan perusahaan asing di Papua Nugini juga membuat perusahaan lokal melemah karena kalah saing.

## **Kesimpulan**

Penulis mengambil kesimpulan bahwa keputusan Papua Nugini bersedia bekerjasama dengan Australia dalam *PNG Solution* yang dijelaskan melalui perspektif Neo-Marxisme adalah Papua Nugini telah terjebak dalam perangkat ketergantungan Australia. Pemerintah Papua Nugini tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran *PNG Solution* tersebut meski sebelumnya telah mengalami pengalaman buruk dalam *Pacific Solution*. Namun hal ini

tidak membuat pemerintah Papua Nugini jera untuk kembali bekerjasama dengan Australia dalam bidang imigrasi ini. Bahkan tawaran yang diberikan tersebut disambut dengan baik oleh pemerintah Papua Nugini.

Adanya sambutan baik tersebut bukanlah hal yang mengejutkan mengingat Papua Nugini merupakan negara terbelakang yang kekurangan modal dan memiliki berbagai permasalahan. Sejauh ini, Papua Nugini menerima Bantuan Luar Negeri secara rutin dari Australia yang sekaligus sebagai pendonor terbesar dengan tujuan untuk membantu Papua Nugini bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua Nugini. Dilain sisi, Australia sebagai negara tujuan utama para pencari suaka yang mulai khawatir atas pertahanan nasionalnya memilih untuk menyusun kerjasama imigrasi baru terkait pencari suaka. Meskipun sebelumnya juga telah menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat dengan mengirimkan pencari suaka ke detensi Pulau Manus, Papua Nugini. Tetapi hal tersebut belum cukup membuat pemerintah Australia tenang terhadap pertahanan nasionalnya. Oleh karena itu, pemerintah Australia pun memilih untuk menempatkan pencari suaka yang telah mendapat status legal di Papua Nugini dibanding di Australia. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya tersebut, Australia memilih untuk menawarkan kerjasama imigrasi ke Papua Nugini dalam *PNG Solution*. Dipilihnya Papua Nugini ini dikarenakan telah masuknya pemerintah Papua Nugini kedalam perangkap ketergantungan. Terlebih lagi, pemerintah Papua Nugini yang memiliki kegemaran korupsi sehingga tidak mungkin apabila tawaran tersebut akan ditolak meskipun *PNG Solution* ini sebenarnya bertentangan dengan konstitusi Pengungsi tahun 1951.

Selain itu, Papua Nugini menjadi mustahil untuk menjauh bahkan memutuskan hubungan dengan Australia mengingat Australia hampir memiliki kekuatan di setiap bidang. Kekuatan Australia ini tidak hanya sekedar diakui adanya keberadaan kekuatan Australia di Papua Nugini melainkan kekuatan yang menguasai dan mendominasi, contohnya saja dalam bidang investasi asing. Perusahaan asal Australia bernama Digitec menjadi perusahaan seluler terbesar di Papua Nugini. Namun adanya dominasi Australia dalam bisnis di Papua Nugini ini juga dikarenakan kesalahan dari pemerintah Papua Nugini yang memilih untuk mempromosikan investasi asing sebagai strategi pembangunan industri sehingga semakin besar kekuatan asing yang datang hingga mengakibatkan perusahaan lokal kalah saing.

## Daftar Pustaka

### JURNAL

Murphy, Lieutenant Commander D. "People Smuggling: Defending Australia's National Interest". *Geddes Papers* (2003).

### ARTIKEL / KORAN ONLINE

Anonim. "Flight From Nauru ends Pacific Solution." *The Sydney Morning Herald*, 8 Februari 2008. <http://www.smh.com.au/national/flight-from-nauru-ends-pacific-solution-20080207-1qww>(diakses pada 24 Oktober 2017).

Anonim. "Assylum Seekers Arriving by Boat to be Resettled in Papua New Guinea", *ABC News Online*, 20 Juli 2013. <http://www.abc.net.au/news/2013-07-19/manus-island-detention-centre-to-be-expanded-under-rudd27s-asy/4830778>(diakses pada 12 November 2016).

Anonim. "Australia's Boat People: The PNG Solution", *The Economist Online*, 27 Juli 2013. <https://www.economist.com/news/asia/21582320-shadow-looming-election-falls-desperate-asylum-seekers-png-solution>(diakses pada 24 Oktober 2017).

Anonim. "Australia – Papua Nugini Libatkan Intel Berantas Korupsi." *Detik News Online*, 4 Desember 2013. <https://news.detik.com/australia-plus-abc/2432459/australia---papua-nugini-libatkan-intel-berantas-korupsi>(diakses pada 31 Oktober 2017).

Duffy, Conor & Justin Stevens. "Pusat Detensi Pulau Manus Kejam dan Tak Manusiawi", *ABC Radio Australia*, 12 Desember 2013. <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-12/pusat-detensi-pulau-manus-kejam-dan-tak-manusiawi/1233490>(diakses pada 12 November 2016).

Hayward-Jones, Jenny. "Australia – Papua New Guinea Relation: Maintaining The Friendship." *Lowy Interpreter Online*, 1 Desember 2015. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-papua-new-guinea-relations-maintaining-friendship>(diakses pada 19 Oktober 2017).

McLeod, Shane. "Australian Police to train Bougainville Force." *ABC Online*, 7 September 2004. <http://www.abc.net.au/am/content/2004/s1193835.htm>(diakses pada 31 Oktober 2017).

Squires, Nick. "Australia Extends Power." *Daily Telegraph Online*, 12 Desember 2003. <http://www.telegraph.co.uk/news/1449299/Australia-extends-Pacific-power.html>(diakses pada 31 Oktober 2017).

## **SITUS RESMI**

Observatory of Economic Complexity (OEC), *Papua New Guinea*, <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/png/#Destinations>(diakses pada 31 Oktober 2017).

## **DOKUMEN NEGARA DAN ORGANISASI**

Commonwealth of Australia. *The Contribution of Australian aid to Papua New Guinea's Development 1975-2000*. Canberra: Australian Agency for International Development, 2003.

World Bank. *Papua New Guinea: GDP Current*. <https://data.worldbank.org/country/papua-new-guinea>(diakses pada 31 Oktober 2017).

## **LAPORAN / KARYA ILMIAH / SKRIPSI**

Glazebrook, Diana. "Papua New Guinea's Refugee Track Record and Its Obligations under the 2013 Regional Resettlement Arrangement with Australia." *SSGM DISCUSSION PAPER 2014/3, Australia National University*, (Maret 2016). <http://ips.cap.anu.edu.au/sites/default/files/DP-2014-3-Glazebrook-ONLINE.pdf> (diakses pada 17 November 2016).

